

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsep politik tanpa mahar merupakan suatu konsep yang muncul dan dicetuskan oleh Partai NasDem yang berawal dari kegelisahan Partai NasDem melihat situasi kepartaian di Indonesia yang terdapat suatu “ruang kosong” yaitu tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap partai politik yang rendah, sehingga konsep tersebut lahir guna menjawab dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap partai politik;
2. Konsep politik tanpa mahar juga merupakan konsep yang dicetuskan guna meringankan beban finansial calon kepala daerah sehingga calon tersebut dapat berkonsentrasi membangun daerah dan meminimalisir kasus korupsi karena tidak harus memikirkan cara mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan Pilkada;
3. Melalui konsep politik tanpa mahar Partai NasDem ingin mengajak kepada partai politik untuk tidak mengambil keuntungan baik pribadi maupun organisasi dari pelaksanaan Pilkada, dan juga sekaligus memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat menghasilkan pemimpin yang baik bagi mereka dengan diawali dari tahapan yang baik;

4. Konsep politik tanpa mahar pada dasarnya adalah konsep untuk meniadakan biaya yang diberikan oleh kandidat kepada partai politik maupun dari partai politik yang meminta biaya kepada kandidat agar mendapatkan dukungan untuk maju dalam Pilkada, artinya Partai NasDem memberikan dukungan kepada kandidat calon kepala daerah secara gratis setelah melalui mekanisme rekrutmen yang sesuai dengan Pedoman Organisasi Partai NasDem;
5. Pada saat memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Partai NasDem melakukan proses rekrutmen yang berbeda dari daerah lain dimana NasDem tidak membuka pendaftaran atau bersifat tertutup. Sehingga yang dilakukan adalah menunjuk langsung Ahok sebagai calon gubernur tanpa meminta mahar melalui pertimbangan kinerja Ahok yang baik berdasar hasil survei dan juga berdasarkan pada pengamatan langsung dari DPP Partai NasDem termasuk ketua umum;
6. Rekrutmen yang dilakukan terhadap Ahok berdasarkan teori Rahat & Hazan bersifat inklusif mengingat Ahok bukan merupakan kader Partai NasDem, kemudian diseleksi secara eksklusif karena diseleksi langsung oleh DPP, dan diseleksi secara sentralistik atau terpusat, serta diputuskan secara otoriter mengingat ketua umum Partai NasDem melakukan penunjukan langsung berdasar beberapa pertimbangan dan masukan.

B. SARAN

1. Konsep politik tanpa mahar seharusnya tidak hanya menggratiskan dukungan kursi di DPRD, akan tetapi juga berupaya untuk mengurangi beban seorang kandidat terkait dengan biaya saksi, kampanye, dan lainnya sehingga membantu kandidat yang memiliki keterbatasan pendanaan namun memiliki kelebihan dari segi kemampuan mengelola pemerintahan;
2. Konsep politik tanpa mahar memang cukup sulit untuk diungkap mengingat prosesnya yang terjadi dibelakang layar, sehingga perlu adanya transparansi dari partai politik terkait laporan keuangan yang masuk dan keluar pada saat penentuan kandidat hingga selesai pelaksanaan Pilkada;
3. Partai harus mampu membantu kandiad dan berinovasi di dalam proses pencarian pendanaan seorang kandidat dengan tidak mengabaikan aturan-aturan hukum.